

Judul : Ongkos Naik Haji masih Bisa Ditekan
Tanggal : Sabtu, 21 Januari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Ongkos Naik Haji masih Bisa Ditekan

Pemerintah didesak untuk mengkaji ulang usulan kenaikan ongkos haji. Setidaknya kenaikan beban biaya haji bagi jemaah tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi per tahap menuju ideal, yakni 70:30.

DINDA SHABRINA
dinda@mediaindonesia.com

BIAYA perjalanan ibadah haji atau biph tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang seperti diusulkan Kementerian Agama dinilai terlalu tinggi. Jika dibandingkan dengan 2022, tahun ini biph naik sebesar 73% dari Rp39.886.009.

Anggota Komisi VIII DPR Luqman Hakim mengatakan kenaikan biaya haji tahun 2023 yang ditanggung jemaah tidak boleh melampaui angka Rp55 juta.

"Menurut saya, Rp55 juta itu sudah di batas psikologi kenaikan biaya haji yang ditanggung tiap jemaah," ujar Luqman dalam keterangannya, kemarin.

Dia menilai angka yang diajukan Kemenag sebesar Rp69 juta itu masih akan dikaji lebih mendalam bersama Komisi VIII. "Saya pastikan, Komisi VIII akan menghitung faktor yang penting dipertimbangkan dalam memutuskan kenaikan biaya haji 2023," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengaku terkejut dengan keputusan pemerintah tersebut. Pasalnya, hal itu jelas sangat memberatkan jemaah karena kenaikan yang sangat drastis.

"Kami tentu belum bisa menerima itu. Kita carilah (solusi) karena terlalu drastis menuju ideal itu dan prinsip-prinsipnya juga tidak terpenuhi,"

Biaya Haji 2022 dan Usulan Biaya Haji 2023

2022

BPHI = Rp98,37 juta

Rp39,88 juta (40,54%) dibebankan ke jemaah.

Rp58,49 juta (59,46%) dari pemerintah.

Usulan 2023

BPHI = Rp98,89 juta

Rp69,19 juta (70%) ditanggung oleh jemaah.

Rp29,70 juta (30%) dibayar oleh pemerintah.



Sumber: Kemenag/Litbang MI

ujarnya ketika dihubungi kemarin.

Marwan mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan itu. Setidaknya kenaikan beban biaya haji bagi jemaah tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi per tahap menuju ideal, yakni 70:30.

"Jemaah tahun lalu menikmati subsidi yang cukup besar sekitar 60%, tiba-tiba berbalik subsidi 30% beban jemaah 70%. Itu kan prinsip keadilan menjadi hilang. Kenapa tahun lalu bisa menikmati subsidi besar sekarang menjadi kecil," jelasnya.

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyarankan waktu penyelenggaraan ibadah haji lebih

dipersingkat untuk memangkas biaya.

"Coba dua hari saja dikurangi harinya, efeknya itu lumayan signifikan, lumayan banyak. Misalnya dari 42 hari jadi 40 hari, itu berarti efek domino, secara otomatis hotel lebih hemat, transportasi lebih hemat, living cost juga," ujarnya ketika dihubungi, kemarin.

Mustolih menyebut saran tersebut memang masih perlu dikaji bersama. Jika memang ingin dipersingkat, dihitung waktu yang memungkinkan atau masuk akal untuk penyelenggaraan haji dengan minim kendala atau hambatan.

"Harus ada terobosan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji itu," ujarnya.

Pasrah

Andi Surawati, 44, pemilik travel haji dan umrah di Sulsel, mengatakan pihaknya hanya bisa pasrah terkait usulan kenaikan ongkos haji ini.

"Kita bisa apa kalau memang harus naik," ujarnya.

Surawati mengakui, sudah ada beberapa jemaahnya yang datang dan mengeluh soal usulan kenaikan ongkos haji ini. Namun, intinya, katanya, mereka hanya bisa pasrah.

Nawar Hawa, 67, salah satu daftar tunggu jemaah calon haji di Kota Makassar, Sulsel, mengaku telah menyiapkan dana sekitar Rp50-an juta untuk berangkat haji.

"Jika misalnya, memang nanti harus Rp69 juta, itu yang pasti diusahakan. Insya Allah jika memang sudah panggilan dari Allah, ada jalannya. Cuma memang butuh persiapan, butuh usaha, tidak langsung ada uangnya," sebut pensiunan PNS itu. (Van/Tri/Gan/LN/X-10)